

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Jum'at, 30 Maret 2018 - Rizki Arrida

KANWIL Kementerian Hukum dan HAM Kalsel berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel terkait pembinaan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Komitmen melayani publik sepenuh hati dan siap mewujudkan WBK/WBBM disampaikan Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Kalsel Andi Basmal saat bertemu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid, Kamis (29/3/2018).

"Keseriusan dalam mewujudkan WBK/WBBM telah diawali pada dua unit pelaksana teknis, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin. Kanwil Kemenkumham Kalsel berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel pada pelaksanaan zona Integritas menuju WBK/WBBM," ucap Andi Basmal.

Ia mengatakan, komitmen ini harus didukung segenap elemen, baik petugas maupun pimpinan satuan kerja, karena penilaian bukan sekedar administrasi, namun perubahan menyeluruh terhadap pelayanan publik.

Kanwil Kemenkumham Kalsel telah mempersiapkan Lapas Kelas IIA Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang saat ini sudah tahap pembinaan WBK/WBBM. Ada 25 UPT se-Indonesia yang diusulkan Kemenkumham dan akan diseleksi sebanyak lima UPT Oleh KemenPAN-RB untuk ditetapkan sebagai UPT yang memperoleh WBK pada akhir tahun nanti.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid menyambut baik pencairan Zona Integritas WBK/WBBM. Dalam pertemuan itu, Noorhalis juga menyatakan keprihatinannya terkait over capacity hunian di Lembaga Pemasyarakatan di Kalsel, khususnya di Lapas Teluk Dalam dan Kotabaru. "Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang harus diperbaiki. Penuhnya penghuni Lapas/Rutan, tentunya berpengaruh terhadap kualitas pembinaan," pungkasnya.(jejakrekam)